

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU Nomor 5 Tahun 1960. LN RI Nomor 104 Tahun 1960.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*. PP Nomor 24 Tahun 1997. LN RI Nomor 59 Tahun 1997.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. PP Nomor 37 Tahun 1998. LN RI Nomor 52 Tahun 1998.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Perka BPN Nomor 1 Tahun 2006.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU Nomor 2 Tahun 2014. LN RI Nomor 3 Tahun 2014.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. PP Nomor 24 Tahun 2016. LN RI Nomor 120 Tahun 2016.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018. BN Nomor 395.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*. PP Nomor 18 Tahun 2021. LN RI Nomor 28 Tahun 2021.

## B. Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Hardjowahono, Bayu Seto. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan, 1992
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2013
- Prodjodikoro, Wirjono R. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2000
- Remalan, Eman. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata Title/Apartemen*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015
- Simanjuntak P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Soesilo R. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Jakarta: Karya Nusantara, 1989
- Soeroso. *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Subekti. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermedia, 2005
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1989

## C. Lain-Lain

- Annisa Cindy dkk, 2021, *Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara*, Indonesia Journal of Kriminal Law Universitas Hasanudin, Makassar.

Assikin Yovita Christian dkk, 2019, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan Dengan Dibatalkan Akta Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Bandung.

Kholida Qothrunnada, *Pengertian Tanggung Jawab, Lengkap dengan Contoh, Bentuk dan Ciri-cirinya*, (<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 20.20 WIB).

Kristina, *Arti Supremasi Hukum dan Prinsip Dasar Negara Hukum Lainnya*, (<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5833358/arti-supremasi-hukum-dan-prinsip-dasar-negara-hukum-lainnya>, 23 Maret 2022 pukul 19.10 WIB).

Muhammad Choirul Anwar, *Kenali Apa Itu AJB dan Bedanya dengan PPJB Saat Beli Rumah atau Tanah*, (<https://money.kompas.com/read/2021/08/12/122350026/kenali-apa-itu-ajb-dan-bedanya-dengan-ppjb-saat-beli-rumah-atau-tanah?page=all>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 20.35 WIB).

Mulyana, Dedy dkk, 2021, *Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum*, Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.

Putusan Pengadilan Cibinong Nomor 307/Pdt. G/2017PN Cbi, tanggal 24 Oktober 2018